

2021

RENCANA KERJA



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Alamat: Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Wing 6 Lt. 2
Jl. Andi Pattana Endeng No. Mamuju, Kode Pos 91511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis harus di terjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.
- Mengingat :
- a) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - e) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- m) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025;
- n) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022
- o) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- p) Peraturan Gubernur No 45 tahun 2016 tentang kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman berpedoman pada Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, Dokumen Renstra OPD Tahun 2017-2022, Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dan arah kebijakan pembangunan Nasional Tahun 2021.
- Ketiga : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada poin KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.
- Keempat : Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, meliputi :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
 - Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 - Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan OPD
 - Bab V : Penutup
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal : April 2020

KEPALA DINAS,

A. ACO TAKDIR, S.Sos. M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19670702 199103 1 011

Tembusan : kepada Yth;

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) di Mamuju
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
3. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
4. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
5. Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
6. Arsip.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD, dimana isi dokumen tersebut merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi OPD. Penyusunan renja OPD mengakomodasi hasil forum multistakeholder OPD dan menjadi masukan utama bagi penyusunan RKPD, RKA OPD, KUA, PPAS dan RAPBD. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020.

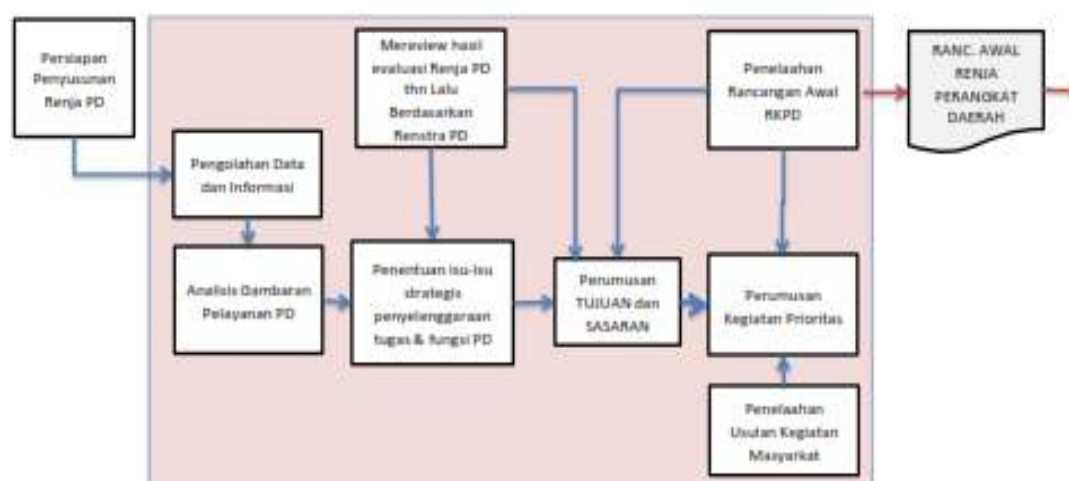
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang disusun oleh Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD.

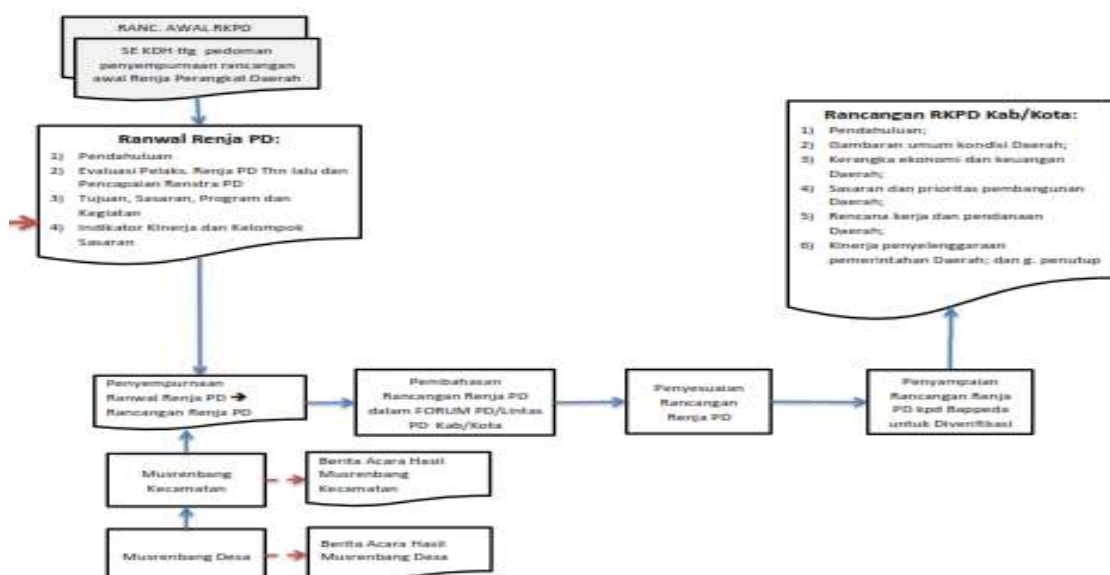
Prinsip-prinsip penyusunan Renja OPD berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD. Penyusunan Renja OPD buka merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Substansi rancangan Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikator serta sumber dananya. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan tas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, biaya satuan per kelauaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Tahapan penyusunan rancangan Renja OPD mencakup persiapan penyusunan rancangan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan

Renstra OPD, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, penelaahan rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan masyarakat dan perumusan kegiatan prioritas. Dalam penyusunan Renja 2021 berpedoman pada Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, Dokumen Renstra OPD Tahun 2017-2022, Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dan arah kebijakan pembangunan Nasional Tahun 2021. Tema arah kebijakan pembangunan Nasional Tahun 2021, yaitu Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas. Adapun tema arah kebijakan prioritas pembangunan Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Barat, yaitu : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas untuk Pembangunan Berkelanjutan, dengan 5 prioritas provinsi, antara lain : peningkatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi inklusif, keberlanjutan lingkungan hidup. Pada penyusunan Renja Tahun 2021 merupakan peralihan nomenklatur dari Pemdagri 13 Tahun 2006 yang akan dipetakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun skema penyusunan rancangan Renja OPD pada Gambar 1.1.





Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rancangan renja

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renja-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- a) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- l) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025;
- m) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- n) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
- o) Peraturan Gubernur No 45 tahun 2016 tentang kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi Sulawesi Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja OPD Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi unit kerja dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan. Adapun tujuan

dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 adalah :

- a. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2021 yang mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Merupakan kerangka acuan dalam menentukan program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.
- c. Untuk lebih terarah dan terukurnya kinerja program sesuai dengan target yang ingin dicapai pada Tahun 2021.
- d. Merupakan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran RENJA OPD, program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Bab ini berisikan tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil keluaran pada sistem Perencanaan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Dalam rangka mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan 2019. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah yang menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja. Indikator Kinerja kegiatan terdiri dari indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya. Dari perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Rencana kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan atau implementasi rencana kerja tersebut. Rencana kerja (Renja OPD) tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan.

Adapun Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 sebesar Rp. 5.729.539.815,62,- dengan tingkat realisasi capaian kinerja keuangan sampai dengan triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp. 5.498.008.000,- dengan persentase sebesar 95,96 %.

Dari hasil evaluasi kinerja Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada Pada Tahun 2020 terdapat kegiatan yang memiliki nilai peringkat kinerja yang sudah sangat tinggi (ST), beberapa hal yang masih kurang disebabkan karena:

1. Adanya pengurangan anggaran (rasionalisasi anggaran) terhadap kegiatan fisik yang belum dilaksanakan sebelum triwulan 4 sehingga capaian kinerja kegiatan yang dilakukan rasionalisasi anggaran tidak tercapai dan tidak adanya perubahan anggaran.
2. Pada Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Expose/Promosi Upaya Penanganan

Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam direncanakan dilaksanakan 2 kali kegiatan expose akan tetapi hanya dilaksanakan 1 kali karena tidak ada event pelaksanaan sehingga pada kegiatan tersebut masih terdapat sisa pagu.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi pendidikan teknis lingkungan yang belum memadai.
4. Sarana dan prasarana lingkungan belum memadai.

Kondisi tersebut berimplikasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan Tahun 2019 yang ditargetkan 100 % di bulan Desember 2019 ternyata hanya mampu mencapai 95,96%. Untuk mengantisipasi capaian target kinerja program dan kegiatan Tahun anggaran 2019, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melalui diklat teknis dan diklat formal.
2. Penegasan pelaksanaan SOP bagi pegawai struktural dan teknis untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.
3. Membangun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan.
4. Tetap melengkapi pengadaan sarana prasarana Laboratorium Lingkungan di Tahun 2020.
5. Membuat Rencana Aksi pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2020.

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 pada Tabel 2.1 dan Evaluasi Kinerja Tahun Berjalan pada Tabel 2.2.

2.2. CAPAIAN RENSTRA OPD

Renstra OPD merupakan landasan kebijakan strategi lima tahunan di bidang lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Periode 2017-2022, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan.

Tabel evaluasi capaian RENSTRA OPD 2017-2022 pada Tabel 2.3.

2.3 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Analisis Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2012 – 2018. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dilihat dari capaian kinerja pada Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat yang dihitung melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 sektor, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan, adanya penurunan indeks kualitas lingkungan hidup setiap tahun dipengaruhi oleh indeks kualitas air dan tutupan lahan. Berikut Capaian Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan pada Tabel 2.3, 2.4 dan 2.5 Tahun 2012 – 2018.

Tabel 2.3
Indeks Kualitas Air Sulawesi Barat

| Provinsi/Kabupaten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kabupaten Pasangkayu | 46,67 | 30,00 | 55,33 | 40,00 | 33,67 | 55,56 | - |
| Kabupaten Mamuju/Mamuju Tengah | 58,33 | 88,89 | 66,67 | 48,33 | - | - | - |
| Kabupaten Majene | 100,00 | 33,33 | 50,00 | 50,00 | 79,00 | - | - |
| Kabupaten Polewali Mandar | 96,67 | 96,67 | 64,00 | 42,00 | 59,33 | 33,33 | - |
| Kabupaten Mamasa | 90,00 | 100,0 | 50,00 | 48,86 | 53,43 | 67,14 | - |
| Provinsi Sulawesi Barat | 78,33 | 69,78 | 57,20 | 45,84 | 54,11 | 52,01 | 53,20 |

Tabel 2.6
Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat

| Provinsi/Kabupaten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kabupaten Pasangkayu | 99,51 | 97,71 | 96,42 | 99,26 | 99,64 | 94,53 | - |
| Kabupaten Mamuju | 98.18 | 97.36 | 95,46 | 99,21 | 99,57 | 92,29 | - |
| Kabupaten Majene | 99.78 | 98.28 | 97,85 | 99,35 | 98,92 | 81,91 | - |
| Kabupaten Polewali Mandar | 99.44 | 97.88 | 97,85 | 99,23 | 99,33 | 88,66 | - |
| Kabupaten Mamasa | 99.58 | 98.59 | 97,06 | 99,41 | 99,61 | 87,32 | - |
| Kabupaten Mamuju Tengah | - | - | - | - | 99,64 | 90,83 | - |
| Provinsi Sulawesi Barat | 99.20 | 97.43 | 96,68 | 99,29 | 99,45 | 89,23 | 90,00 |

Tabel 2.7
Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat

| Provinsi/Kabupaten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pasangkayu | 99.51 | 82.33 | 65,07 | 63,48 | 62,50 | 62,21 | - |
| Mamuju | 98.18 | 82.97 | 77,27 | 76,58 | 70,27 | 73,66 | - |
| Majene | 99.28 | 58.55 | 53,17 | 50,81 | 52,48 | 51,60 | - |
| Polewali Mandar | 99.44 | 34.37 | 36,56 | 40,62 | 40,94 | 39,37 | - |
| Mamasa | 99.58 | 71.75 | 66,79 | 67,29 | 68,48 | 66,76 | - |
| Mamuju Tengah | - | - | - | - | 82,23 | 79,41 | - |
| Provinsi Sulawesi Barat | 99.20 | 75.44 | 66,96 | 67,28 | 62,82 | 62,17 | 62,08 |

2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Untuk mencapai penyelenggaraan lingkungan strategis agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Dalam menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD maka dilakukan pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Tabel 2.8).

Tabel 2.8. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 |
| 1 | Permasalahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | Degradasi lingkungan pada wilayah pesisir | Pola pemukiman di Sulawesi Barat yang sebagian besar berada di wilayah pesisir secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekosistem di sekitarnya. Kebijakan pembangunan di lain pihak memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain berdampak terhadap degradasi lingkungan. Potensi dan sumber daya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat sangat potensial untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Berdasarkan data, kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat terancam mengalami kerusakan diakibatkan Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kearifan lokal dalam mengelolah lingkungannya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya penanggulangan serta perlindungan terhadap kawasan ekosistem hutan mangrove di Sulawesi Barat. |
| 2 | Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan dan Sumber-Sumber Air. | Menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak sosial ekonomi | Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Kecenderungan ini tampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri. Faktor-faktor penyebab terjadinya banjir dan kekeringan/kebakaran di masing-masing daerah berdasarkan analisis data perubahan penutupan lahan dan iklim disebabkan oleh semakin luasnya lahan kritis akibat pembalakan hutan secara besar-besaran dan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, yang berakibat semakin luasnya padang alang-alang dan semak belukar. Lahan seperti ini sangat kecil resistensinya dalam menahan air pada musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau panjang yang berdampak pada kebakaran hutan. Terjadinya lahan kritis dapat menyebabkan kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah. Perlu adanya upaya dan solusi untuk mengurangi lahan kritis pada masing-masing daerah yaitu melakukan reklamasi dengan membuat tanaman penghijauan, penanaman tanaman semusim, dan pembuatan teras. |
| 3 | Permasalahan Pencemaran Lingkungan | Penanggulangan sampah belum optimal | Pola hidup masyarakat Sulawesi Barat dalam mengelola sampah masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat menjadikan sungai dan pantai sebagai tempat pembuangan sampah yang paling praktis. Akibatnya terjadi pencemaran air dan menimbulkan banjir pada musim penghujan. Selain sampah-sampah, limbah-limbah rumah tangga lainnya secara umum di Sulawesi Barat belum ada yang dikelola sebelum di buang ke lingkungan. Fenomena ini bukan hanya menjadi persoalan satu wilayah tetapi sudah menjadi isu pokok di hampir seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu diperlukan tindakan sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat bagaimana mengelola sampah yang baik dengan penerapan sistem 3 R, pengolahan sampah menjadi bahan biogas dll. |

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Permasalahan Pengembangan generasi lingkungan | Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan belum menjadi kegiatan yang menarik untuk di kembangkan | Perkembangan pembangunan sekarang ini seringkali mengabaikan aspek lingkungan hidup karena dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat masa kini yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perhatian khusus kepada pengembangan generasi lingkungan. Keberlangsungan hidup di bumi ini adalah tanggung jawab kita bermasa, termasuk di dalamnya adalah masyarakat; baik usia dewasa ataupun muda yang dikenal dengan generasi muda |
| 5 | Permasalahan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan | penyelesaian penegakan hukum belum optimal | Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara antara berbagai bidang hukum klasik. Salah satu faktor penghambat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Barat adalah tidak tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai kewenangan khusus dalam pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini tidak berbanding lurus dengan banyaknya kasus lingkungan yang muncul setia tahunnya. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah mengedepankan tindakan preventif dengan melakukan pendekatan dalam rangka pembinaan. Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk Pos Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH) sebagai tindak lanjut penyelesaian penegakan hukum di Provinsi Sulawesi Barat. |

Penentuan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan pemetaan yang dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Permasalahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat 16.787,18 kilometer persegi dengan luas wilayah laut sebesar 20.342 kilometer persegi. Panjang garis pantai barat memanjang dari utara ke selatan sepanjang 677 kilometer dengan jumlah pulau sebanyak 40 pulau. Dari 6 wilayah kabupaten di Sulawesi Barat, 5 diantaranya berada di daerah pesisir pantai. Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil. Pola pemukiman di Sulawesi Barat yang sebagian besar berada di wilayah pesisir secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekosistem di sekitarnya. Kebijakan pembangunan di lain pihak memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain berdampak terhadap degradasi lingkungan. Seperti diketahui, kota Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur dilakukan dengan cara reklamasi pantai. Salah satu contoh adalah proyek pembangunan jalan arteri yang rencananya akan menghubungkan Kantor Gubernur Sulawesi Barat sampai dengan Bandar Udara Tampa Padang, akan melewati beberapa kawasan hutan mangrove. Proyek pembangunan ini secara tidak langsung akan merusak ekosistem mangrove yang ada di perairan Mamuju.

Pada kondisi lain, sebagian nelayan tangkap dalam melakukan penangkapan ikan masih banyak yang menggunakan bom. Kondisi ini berpengaruh terhadap kondisi terumbu karang di perairan Sulawesi Barat. Catatan-catatan tersebut diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya aktivitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara pengeboman. Jika kondisi ini dibiarkan secara terus-menerus, tidak menutup kemungkinan akan merusak ekosistem perairan khususnya kekayaan terumbu karang di Sulawesi Barat yang sudah semakin menurun.

Potensi dan sumber daya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat sangat potensial untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Namun jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang negatif. Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kearifan lokal dalam mengelolah lingkungannya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem.

Tabel 2.9. Kondisi Hutan Mangrove di Sulawesi Barat

| No. | Kabupaten | Kondisi Hutan Mangrove (Ha) | | | |
|--------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | | Baik | Sedang | Rusak | Total |
| 1 | Mamuju | 220.245,00 | 286.450,00 | 183.555,00 | 690.250,00 |
| 2 | Majene | 33,58 | 35,97 | 2,99 | 72,54 |
| 3 | Polewali Mandar | 23,90 | 88,25 | 205,18 | 317,33 |
| 4 | Mamuju Utara | 310,15 | 250,00 | 294,00 | 854,15 |
| 5 | Mamuju Tengah | 22,00 | 21,00 | 24,50 | 67,50 |
| Jumlah | | 220.634,63 | 286.845,22 | 184.081,67 | 691.561,52 |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan data diatas, kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat terancam mengalami kerusakan. Total hutan mangrove yang mengalami kerusakan mencapai 27 persen dan dalam kondisi sedang mencapai 41 persen sedangkan kondisi baik hanya mencapai 32 persen. Jika total 41 persen hutan mangrove dalam kondisi sedang ini tidak dipelihara dan dijaga kelestariannya tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerusakan. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya penanggulangan serta perlindungan terhadap kawasan ekosistem hutan mangrove di Sulawesi Barat.

Potensi kekayaan sumber daya alam perairan di Sulawesi Barat jika dikembangkan akan memberikan kontribusi yang cukup besar. Sebagai contoh misalnya, jika potensi terumbu karang dikembangkan dan dipelihara akan menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup menarik di Sulawesi Barat. Namun pada kenyataannya, luas terumbu karang di Sulawesi Barat jika dibandingkan dengan luas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat kurang. Berdasarkan data yang di himpun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, luas terumbu karang di Sulawesi Barat yang tersebar di 5 kabupaten hanya mencapai 9.719,96 hektar dari total luas perairan yang mencapai 20.342 kilometer persegi.

Untuk lebih jelasnya, kondisi terumbu karang di Sulawesi Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.10. Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Barat

| No. | Kabupaten | Kondisi Terumbu Karang (Ha) | | | | |
|--------|-----------------|-----------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | Sangat baik | Baik | Cukup | Kurang | Luas Total |
| 1 | Mamuju | 600,00 | 1.066,00 | 1.934,00 | 3.600,00 | 7.735,00 |
| 2 | Majene | 0 | 0 | 120,58 | 287,95 | 408,53 |
| 3 | Polewali Mandar | 0 | 477,48 | 0 | 371,75 | 849,23 |
| 4 | Mamuju Utara | 200,07 | 346,23 | 250,48 | 287,95 | 1.084,73 |
| 5 | Mamuju Tengah | 0 | 0 | 36,00 | 15,00 | 51,00 |
| Jumlah | | 800,07 | 1,889,71 | 2.220,48 | 4.274,70 | 9.719,96 |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Tabel di atas menunjukkan bahwa populasi terumbu karang di wilayah Sulawesi Barat pada kondisi sangat baik, baik dan cukup hampir berbanding lurus dengan kondisi kurang. Ini menandakan bahwa potensi kekayaan alam dari terumbu karang di Sulawesi Barat sangat kurang. Jika dilihat secara wilayah, kondisi terumbu karang yang sangat kurang berada di Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah. Sedangkan wilayah dengan kondisi terumbu karang yang masih relatif bagus adalah di Kabupaten Mamuju Utara.

2. Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan dan Sumber-Sumber Air.

Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Kecenderungan ini tampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri. Pembalakan hutan secara liar dan perambahan hutan untuk konversi menjadi lahan pertanian tidak saja mengakibatkan rusaknya habitat ekosistem namun juga mengakibatkan menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak sosial ekonomi penyertanya. Disamping itu dengan rusaknya hutan di daerah hulu mengakibatkan tingginya sedimentasi pada daerah aliran sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai serta menurunnya kualitas air sungai.

Lahan kritis dapat didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Fungsi yang dimaksud pada definisi tersebut adalah fungsi produksi dan fungsi tata airnya. Fungsi produksi berkaitan dengan fungsi tanah sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan dan fungsi tata air berkaitan dengan fungsi tanah sebagai tempat berjangkarnya akar dan menyimpan air tanah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis adalah :

- Terjadinya longsor dan letusan gunung berapi.
- Penebangan liar (illegal logging).
- Kebakaran hutan.
- Pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berasaskan kelestarian.
- Penataan zonasi kawasan belum berjalan.
- Pola pengelolaan lahan tidak konservatif.
- Pengalihan status lahan (berbagai kepentingan).

Lahan kritis umumnya terdapat di daerah pegunungan atau di daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu, dengan ciri utama antara lain lahan berlereng terjal, tanpa atau sedikit vegetasi penutup tanah (gundul), adanya tanda-tanda lahan telah tererosi, dan tanah berwarna merah karena lapisan atasnya telah tererosi. Luas kawasan hutan adalah seluas 1.092.376 Ha diantaranya 452.032 Ha adalah hutan lindung, 330.700 Ha adalah hutan produksi terbatas 71.859 ha adalah hutan produksi biasa, 214.246 Ha adalah Taman Nasional, 944 Ha adalah Taman Hutan Raya dan 22.597 adalah Luas Hutan Produksi Konversi.

Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Kecenderungan ini tampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri. Pembalakan hutan secara liar dan perambahan hutan untuk konversi menjadi lahan pertanian tidak saja mengakibatkan rusaknya habitat ekosistem namun juga mengakibatkan menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas

lingkungan, banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak sosial ekonomi penyertanya. Disamping itu dengan rusaknya hutan di daerah hulu mengakibatkan tingginya sedimentasi pada daerah aliran sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai serta menurunnya kualitas air sungai.

Faktor-faktor penyebab terjadinya banjir dan kekeringan/kebakaran di masing-masing daerah berdasarkan analisis data perubahan penutupan lahan dan iklim disebabkan oleh semakin luasnya lahan kritis akibat pembalakan hutan secara besar-besaran dan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, yang berakibat semakin luasnya padang Terjadinya lahan kritis dapat menyebabkan kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah. Perlu adanya upaya dan solusi untuk mengurangi lahan kritis pada masing-masing daerah yaitu melakukan reklamasi dengan membuat tanaman penghijauan, penanaman tanaman semusim, dan pembuatan teras. Berdasarkan buku Sulbar Dalam Angka 2016, data lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat jika ditotal baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan mencapai 682,927,51 hektar atau sekitar 38 persen dari total kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam alang-alang dan semak belukar.

Potensi kerusakan hutan dan lahan kritis secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersediaan sumber-sumber air. Salah satu faktor pendukung dalam pencadangan sumber daya air adalah kondisi hutan yang masih bagus. Jika hutan sudah rusak dan mengalami kekritisian, maka cadangan sumber air juga secara otomatis akan mengalami pengurangan.

3. Permasalahan Pencemaran Lingkungan

Sampah kerap kali menimbulkan masalah, menjadi pemicu banjir, pencemaran lingkungan, menyebabkan bau tak sedap, merusak pandangan, dan berbagai macam masalah yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Seperti kita ketahui dan sering kita saksikan dilayar kaca, Beberapa tahun terakhir ini Banjir merupakan salah satu persoalan yang akrab dengan semua Negara di dunia, bahkan yang paling parah, hamper sebagian besar wilayah di Indonesia

merupakan banjir langganan tiap tahun saat datangnya musim penghujan. Adapun pemicu banjir itu selain besarnya curah hujan juga diakibatkan adanya penumpukan sampah di saluran air. Kejadian seperti diatas juga tidak akan menutup kemungkinan bakal terjadi di daerah tidak terkecuali di Sulawesi Barat. Penumpukan sampah di saluran-saluran air menyebabkan pendangkalan kali, tersumbatnya aliran air (drainase), yang pada akhirnya menimbulkan genangan air yang berpotensi menimbulkan banjir. Selain banjir, dampak yang ditimbulkan dari pola pembuangan sampah sembarangan adalah terjadinya pencemaran air.

Pola hidup masyarakat Sulawesi Barat dalam mengelola sampah masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat menjadikan sungai dan pantai sebagai tempat pembuangan sampah yang paling praktis. Akibatnya terjadi pencemaran air dan menimbulkan banjir pada musim penghujan. Selain sampah-sampah, limbah-limbah rumah tangga lainnya secara umum di Sulawesi Barat belum ada yang dikelola sebelum di buang ke lingkungan. Fenomena ini bukan hanya menjadi persoalan satu wilayah tetapi sudah menjadi isu pokok di hampir seluruh wilayah Indonesia. Selain pencemaran akibat tata cara pengelolaan sampah yang kurang baik, kegiatan pertambangan juga secara tidak langsung mengakibatkan pencemaran sungai, khususnya kegiatan pertambangan galian sirtu di sungai. Kendaraan yang masuk keluar sungai selain menyebabkan kekeruhan air sungai juga membawa partikel-partikel logam yang menyebabkan pencemaran air sungai.

Hasil perhitungan indeks kualitas air sungai menunjukkan bahwa semua sungai di Sulawesi Barat pada tahun 2016 ini mengalami pencemaran. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam maupun oleh pencemaran dari aktivitas manusia. Seperti contoh di Sungai Mamasa, semua penduduk yang bermukim di sepanjang sungai membuang limbahnya ke sungai khususnya limbah cair rumah tangga. Di samping itu, hewan ternak peliharaan dari warga sepanjang sungai, mengalirkan limbah cairnya langsung ke badan sungai. Proses ini secara tidak langsung mengakibatkan tingginya tingkat pencemaran dari parameter Fecal Coli dan Total

Coli. Berikut hasil perhitungan indeks kualitas air beberapa sungai wilayah Sulawesi Barat.

Tabel 2.12. Indeks Kualitas Air Sulawesi Barat

| Status | Jumlah sampel | Persen | Bobot | Nilai |
|----------|---------------|--------|-------|-------|
| Memenuhi | 15 | 0,22 | 70 | 15,4 |
| Ringan | 48 | 0,72 | 50 | 36 |
| Sedang | 4 | 0,06 | 30 | 1,8 |
| Berat | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Total | 67 | 1 | - | 53,20 |

Sumber : Perhitungan IKLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

4. Permasalahan Pengembangan generasi lingkungan

Generasi muda masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, agar dapat ikut serta dalam mengisi pembangunan yang kini sedang berlangsung. Pemuda di Indonesia sangat beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Secara umum, ada 3 kategori dalam pengelompokan generasi muda berdasarkan umur dan lembaga serta luang lingkup tempat pemuda berada yakni: *Siswa*, usia antara 6 – 18 tahun, masih duduk di bangku sekolah, *Mahasiswa*, usia antara 18 – 25 tahun beradi di perguruan tinggi dan akademi dan *Pemuda di luar lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi* yaitu mereka yang berusia 15 – 30 tahun keatas.

Perkembangan pembangunan sekarang ini seringkali mengabaikan aspek lingkungan hidup karena dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat masa kini yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perhatian khusus kepada pengembangan generasi lingkungan. Keberlangsungan hidup di bumi ini adalah tanggung jawab kita bermasa, termasuk di dalamnya adalah masyarakat; baik usia dewasa ataupun muda yang dikenal dengan generasi muda.

Pengembangan generasi lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat masih belum menjadi kegiatan yang menarik untuk di kembangkan. Program pengembangan sekolah adiwiyata misalnya, sejak diprogramkan pada tahun 2012 hingga saat ini, minat dari sekolah dan partisipatif dari pemerintah kabupaten masih sangat kurang. Faktor penghambat utama adalah kurangnya kepedulian dari instansi yang menangani pendidikan untuk ikut terlibat dalam program kegiatan ini. Satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat yang sangat aktif dalam program pengembangan adiwiyata adalah Polewali Mandar. Selain pengembangan sekolah adiwiyata, pembinaan kaum muda melalui gerakan peduli lingkungan masih belum maksimal. Minat kaum muda untuk berkipul bersama dalam kegiatan aksi lingkungan masih sangat kurang. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perkembangan teknologi yang semakin tak terbatas.

Program Adiwiyata merupakan sebuah gerakan bersama yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2006, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup secara dini kepada generasi bangsa dimulai dari bangku pendidikan. Data yang dihimpun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat hingga tahun 2016 ini, jumlah sekolah peraih penghargaan adiwiyata di Sulawesi Barat baru mencapai 61 sekolah dengan kategori sekolah adiwiyata Provinsi, Nasional dan Kabupaten.

Tabel 2.13. Jumlah Sekolah Peraih Penghargaan Adiwiyata Menurut Kabupaten

| No. | Kabupaten | Jumlah Sekolah |
|--------|-----------------|----------------|
| 1 | Polewali Mandar | 24 |
| 2 | Majene | 17 |
| 3 | Mamuju Utara | 11 |
| 4 | Mamuju | 8 |
| 5 | Mamasa | 1 |
| 6 | Mamuju Tengah | - |
| Jumlah | | 61 |

Sumber : Dokumentasi Dinas LH Sulbar

5. Permasalahan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara berbagai bidang hukum klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan mulai dari Perundang-undangan, Penentuan standar, Pemberian izin, Penerapan dan Penegakan hukum. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat dimaksud adalah Pejabat Fungsional Bidang Lingkungan Hidup yang disebut PPLH.

Salah satu faktor penghambat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Barat adalah tidak tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai kewenangan khusus dalam pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini tidak berbanding lurus dengan banyaknya kasus lingkungan yang muncul setia tahunnya. Sebagai langkah

tindak lanjut, pemerintah mengedepankan tindakan preventif dengan melakukan pendekatan dalam rangka pembinaan.

Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk Pos Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH). Namun sejak terbentuk, pos layanan pengaduan ini tidak dapat berjalan maksimal karena tidak didukung oleh sumber daya manusia pengelola yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pemerintah tetap melakukan penanganan kepada seluruh pengaduan lingkungan yang diterima dengan upaya-upaya pendekatan persuasif.

Dari sekian banyak pengaduan yang telah diterima, hingga saat ini belum ada yang diproses hingga penegakan hukum, baik secara administratif maupun secara pidana atau perdata. Namun demikian, kasus lingkungan yang telah ditangani hingga tahap proses di Kepolisian adalah Rencana Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Polewali Mandar yang diduga menyalahi prosedur.

Tabel 2.14. Jumlah Pengaduan Lingkungan Tahun 2019

| No. | Uraian | Jumlah Kasus Diterima | Jumlah Kasus Diselesaikan | Persentase Penanganan |
|-----|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. | Kabupaten Pasangkayu | 4 | 4 | 100% |
| 2. | Kabupaten Mamuju Tengah | 4 | 4 | 100% |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 4 | 4 | 100% |
| 4. | Kabupaten Majene | 14 | 14 | 100% |
| 5. | Kabupaten Polewali Mandar | 3 | 3 | 100% |
| 6. | Kabupaten Mamasa | 1 | 1 | 100% |

Sumber : Dokumentasi Dinas LH Prov. Sulbar

Kelima isu tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam rencana program kegiatan dalam rangka menjaga agar pembangunan senantiasa berkelanjutan.

2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

Rancangan awal RKPD Tahun 2020 berpedoman pada Draft RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, dan pada visi RPJPD Sulbar 2005-2025, yaitu kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan masyarakat malaqbi. Adapun tema pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 yaitu Pwningktan sumber daya manusia dan daya saing wilayah untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah pagu pada rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 11.300.000.000,- Setelah penetapan KUA/PPAS anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 5.570.678.680-. Dengan turunnya pagu maka beberapa kegiatan yang terdapat pada rancangan awal Renja yaitu sebanyak 72 kegiatan, hanya terdapat 49 kegiatan yang masuk dalam Renja Tahun 2020.

2.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat sudah dilaksanakan melalui kegiatan forum OPD dan penjaringan program dan kegiatan masyarakat melalui usulan instansi lingkungan hidup kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat. Usulan program dan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan masuk dalam Rencana Kerja Tahun 2020, antara lain : Bimbingan teknis pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, Pengembangan sekolah peduli lingkungan Adiwiyata, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan Bimbingan teknis pengelolaan sampah dan TPA.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja SKPD
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2019

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun (2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|----|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 8+9+10+11 | 13 = 12/7*100% | 14 = 6 + 12 | 15 = 14/5*100% | | | | | | | | | | | | |
| | | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Belanja Langsung | | | | | | 5,729,539,816 | | 680,387,953 | | 1,019,307,184 | | 1,005,623,961 | | ##### | | | | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | | | | | 859,034,722 | | 159,590,673 | | 229,650,221 | | 256,105,079 | | 212,279,671 | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Jumlah Surat Yang Terkirim | 60 | Bulan | 195,500,000 | 8,553,000 | 12 | 34,000,000 | 3 | 5,753,289 | 3 | 5,984,211 | 3 | 10,300,000 | 3 | 11,408,000 | 12 | 33,445,500 | 100 | 98.36912 | 12 | 41,998,500 | 20 | 21.4826 | DLH |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening Terbayarkan | 180 | Rekening/ Bulan | 718,000,000 | 106,477,978 | 36 | 53,000,000 | 9 | 11,453,803 | 9 | 12,706,960 | 9 | 13,701,678 | 9 | 15,137,559 | 36 | 53,000,000 | 100 | 100 | 36 | 159,477,978 | 20 | 22.2114 | DLH |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis ATK yang terbeli | 235 | Jenis | 362,500,000 | 101,427,500 | 47 | 60,500,000 | 15 | 12,372,500 | 7 | 8,982,500 | 15 | 20,613,500 | 10 | 18,531,500 | 47 | 60,500,000 | 100 | 100 | 47 | 161,927,500 | 20 | 44.6697 | DLH |
| | | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | Jumlah Barang cetak dan Penggandaan yang tersedia | 60 | Bulan | 55,000,000 | 15,478,500 | 12 | 9,047,200 | 3 | 2,100,000 | | - | 3 | 700,000 | 3 | 6247200 | 9 | 9,047,200 | 75 | 100 | 9 | 24,525,700 | 15 | 44.5922 | DLH |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terbeli | 35 | Jenis | 885,000,000 | 54,250,000 | 5 | 51,632,522 | | - | | - | 5 | 50,865,400 | | - | 5 | 50,865,400 | 100 | 98.51427 | 5 | 105,115,400 | 14.2857 | 11.8774 | DLH |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang terbeli | 35 | Jenis | 440,000,000 | 10,075,000 | 9 | 19,400,000 | | - | | - | 3 | 4,000,000 | 6 | 15,400,000 | 9 | 19,400,000 | 100 | 100 | 9 | 29,475,000 | 25.7143 | 6.69886 | DLH |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbeli | 10 | Bahan Bacaan | 95,000,000 | 18,700,000 | 0 | - | | - | | - | 0 | - | | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700,000 | 0 | 19.6842 | DLH |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah bahan makan minum yang terbeli | 25 | Jenis | 365,000,000 | 48,164,500 | 3 | 44,310,000 | 1 | 7,545,000 | 1 | 10,415,700 | | 12,699,000 | 1 | 13,632,800 | 3 | 44,292,500 | 100 | 99.96051 | 3 | 92,457,000 | 12 | 25.3307 | DLH |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah | Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah | 100 | OP | 1,375,000,000 | 599,240,869 | 26 | 362,144,999.62 | 7 | 98,406,081 | 7 | 95,544,850 | 5 | 80,251,501 | 7 | 87,922,112 | 26 | 362,124,544 | 100 | 99.99435 | 26 | 961,365,413 | 26 | 69.9175 | DLH |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun (2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | | |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|----|------------|-----|-------------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---|-----------|
| | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | K | Rp. (000) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah | 100 | OP | 1,345,000,000 | 463,421,000 | 20 | 225,000,000 | 4 | 21,960,000 | 6 | 96,016,000 | 5 | 62,974,000 | 5 | 44,000,500 | 20 | 224,950,500 | 100 | 99.978 | 20 | 688,371,500 | 20 | 51.18 | DLH | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.50 | 89.68 | | | 15.73 | 28.88 | 2.63 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | T | | | SR | SR | | | | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | 255,772,000 | | 28,971,837 | | 50,059,840 | | 113,508,799 | | 56,777,423 | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Meubeleur Kantor dan Laboratorium yang terbeli | Jumlah Meubeleur Kantor dan Laboratorium yang terbeli | 40 | Unit | 880,000,000 | 36,130,000 | 2 | 34,900,000 | | 0 | | 0 | 2 | 34,640,000 | | 260,000 | 2 | 34,900,000 | 100 | 100 | 2 | 71,030,000 | 5 | 8.07159 | DLH | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala | 48 | Bulan | 400,000,000 | - | 12 | 13,000,000 | 3 | 2,910,000 | 3 | 0 | 3 | 4,837,000 | 3 | 5,233,000 | 12 | 12,980,000 | 100 | 99.84615 | 12 | 12,980,000 | 25 | 3.245 | DLH | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah kendaraan operasional dan mobil jabatan yang terpelihara | 36 | Unit | 1,150,000,000 | 185,062,146 | 6 | 120,000,000 | 1 | 6,611,837 | 2 | 37,120,893 | 2 | 57,855,399 | 1 | 15,617,183 | 6 | 117,205,312 | 100 | 97.67109 | 6 | 302,267,458 | 16.6667 | 26.2841 | DLH | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara | 90 | Unit | 225,000,000 | 34,722,600 | 15 | 25,000,000 | 7 | 10,000,000 | 3 | 3,000,000 | 2 | 706,800 | 3 | 8,039,840 | 15 | 21,746,640 | 100 | 86.98656 | 15 | 56,469,240 | 16.6667 | 25.0974 | DLH | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala | 60 | Bulan | 365,000,000 | 51,089,000 | 12 | 37,872,000 | 3 | 5,600,000 | 3 | 5,238,947 | 3 | 12,099,600 | 3 | 14,572,400 | 12 | 37,510,947 | 100 | 99.04665 | 12 | 88,599,947 | 20 | 24.274 | DLH | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya Peralatan gedung kantor secara rutin/berkala | 60 | Bulan | 230,000,000 | 28,900,409 | 12 | 25,000,000 | 3 | 3,850,000 | 3 | 4,700,000 | 3 | 3,370,000 | 3 | 13,055,000 | 12 | 24,975,000 | 100 | 99.9 | 12 | 53,875,409 | 20 | 23.4241 | DLH | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 97.24 | | | 20.67 | 22.08 | 4.42 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | SR | SR | | | | |
| | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kepatuhan Aparatur | | | | | | 42,450,000 | | - | | - | | 41,985,000 | | 50,000 | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang terbeli | 400 | Pakaian | 400,000,000 | 28,605,440 | 83 | 42,450,000 | | 0 | | 0 | 83 | 41,985,000 | | 50,000 | 83 | 42,035,000 | 100 | 99.02238 | 83 | 70,640,440 | 20.75 | 17.6601 | DLH | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 99.02 | | | 10.38 | 8.83 | 4.42 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | SR | SR | | | | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai | | | | | | 161,400,000 | | 68,140,000 | | 18,549,200 | | 8,795,671 | | 58,875,128 | | | | | | | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkatkan Kapasitasnya | 95 | OK | 1,600,000,000 | 161,973,200 | 20 | 161,400,000 | 7 | 68,140,000 | 3 | 18,549,200 | 1 | 8,795,671 | 9 | 58,875,128 | 20 | 154,359,999 | 100 | 95.63817 | 20 | 316,333,199 | 21.0526 | 19.7708 | DLH | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 95.64 | | | 21.05 | 19.77 | 19.77 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | SR | SR | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun (2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | | | | |
|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|---------|---------|-----|
| | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. | K | Rp. (000) | | K | Rp. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | 297,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | 20 | Laporan | 605,000,000 | 111,900,000 | 4 | 66,300,000 | 1 | 5,084,210 | 1 | 4,597,895 | 1 | 13,321,506 | 1 | 42110000 | 4 | 65,113,611 | 100 | 98 | 4 | 177,013,611 | 20 | 29,2584 | DLH |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun | 5 | Laporan | 220,000,000 | 29,680,000 | 1 | 26,800,000 | | 2,744,737 | | 2,800,000 | | 5,600,000 | 1 | 15,600,000 | 1 | 26,744,737 | 100 | 100 | 1 | 56,424,737 | 20 | 25,6476 | DLH |
| | | Penyusunan RKA/DPA - SKPD | Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD tersusun | 10 | Dokumen | 135,000,000 | 16,880,476 | 2 | 25,700,000 | - | 2,550,000 | | 6,400,000 | | 5,790,000 | 2 | 10,800,000 | 2 | 25,540,000 | 100 | 99 | 2 | 42,420,476 | 20 | 31,4226 | DLH |
| | | Penyusunan RKA-P/DPPA - SKPD | Jumlah dokumen RKA-P/DPPA SKPD tersusun | 10 | Dokumen | 135,000,000 | 16,426,429 | 2 | 21,500,000 | | 2,483,553 | | 2,500,000 | | 6,200,000 | 2 | 10,300,000 | 2 | 21,483,553 | 100 | 100 | 2 | 37,909,982 | 20 | 28,0815 | DLH |
| | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD yang terlaksana | 30 | Kabupater | 1,030,000,000 | 136,601,429 | 6 | 121,150,000 | | 10,088,158 | | 10,686,316 | | 19,058,440 | 6 | 77,310,000 | 6 | 117,142,914 | 100 | 97 | 6 | 253,744,343 | 20 | 24,6354 | DLH |
| | | Forum SKPD | Jumlah program dan kegiatan yang disepakati sesuai Program/kegiatan Prioritas | 350 | Program/kegiatan | 450,000,000 | 31,711,905 | 70 | 35,850,000 | 70 | 34,204,000 | | 1,600,000 | | - | | | 70 | 35,804,000 | 100 | 100 | 70 | 67,515,905 | 20 | 15,0035 | DLH |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 98.98 | | | | | 20.00 | 25.67 | 4.28 | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | | | SR | SR | | | |
| | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | 120,060,500 | 5 | 83,160,500 | | 25,400,000 | | - | | 9,650,000 | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah peserta HPSN | 1000 | Orang | 800,000,000 | 74,293,035 | 200 | 60,558,000 | 200 | 55,058,000 | | - | | - | 3,750,000 | 200 | 58,808,000 | 100 | 97 | 200 | 133,101,035 | 20 | 16,6376 | DLH | |
| | | Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA | Jumlah aparatur dan masyarakat yang Meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Sampah dan TPA | 12 | Kegiatan | 1,150,000,000 | 200,016,983 | 1 | 59,502,500 | | 28,102,500 | 1 | 25,400,000 | | - | 5,900,000 | 1 | 59,402,500 | 100 | 100 | 1 | 259,419,483 | 8.33333 | 22.5582 | DLH | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 98.47 | | | | | 14.17 | 19.60 | 9.80 | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | | | SR | SR | | | |
| | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | | | | | | | 2,037,598,778 | 2 | 153,981,466 | | 315,058,116 | | 311,817,088 | | ##### | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup | Penghargaan kepada masyarakat | 10 | Kegiatan | 1,150,000,000 | 42,924,141 | 2 | 75,400,000 | | - | | - | 2 | 71,846,000 | | | 2 | 71,846,000 | 100 | 95 | 2 | 114,770,141 | 20 | 9,98001 | DLH |
| | | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Jumlah Kota yang dilakukan Pemantauan Adipura | 20 | kab/kota | 1,750,000,000 | 57,682,500 | 4 | 69,839,500 | | 1,430,622 | | 2,000,000 | 2 | 28,048,618 | 2 | 36,239,300 | 4 | 67,718,540 | 100 | 97 | 4 | 125,401,040 | 20 | 7.16577 | DLH |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun (2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | |
|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----|
| | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi | 85 | Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan | 1,300,000,000 | 58,789,785 | 15 | 85,000,000 | 1 | 1,924,641 | 2 | 4,500,000 | 6 | 36,774,800 | 6 | 40,920,000 | 15 | 84,119,441 | 100 | 99 | 15 | 142,909,226 | 17.6471 | 10.993 | DLH | |
| | | Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten | Data Kualitas Air Sungai | 18 | Sungai | 950,000,000 | 53,184,000 | 3 | 750,666,000 | 1 | 60,319,000 | 1 | 21,620,000 | | 30,521,000 | 1 | 611,395,000 | 3 | 723,855,000 | 100 | 96 | 3 | 777,039,000 | 16.6667 | 81.7936 | DLH | |
| | | Peningkatan kapasitas dan kinerja laboratorium | Meningkatnya kapasitas dan kinerja laboratorium | 5 | Kegiatan | 1,650,000,000 | 356,183,542 | 1 | 114,917,578 | | - | | 27,589,450 | | 17,177,578 | 1 | 67,259,199 | 1 | 112,026,227 | 100 | 97 | 1 | 468,209,769 | 20 | 28.3763 | DLH | |
| | | Pengelolaan Pos P3SLH | Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani | 50 | Kasus lingkungan (Provinsi dan Kabupaten) | 700,000,000 | 84,128,158 | 10 | 80,000,000 | 1 | 1,332,536 | 3 | 23,194,214 | 2 | 14,696,800 | 4 | 38,580,000 | 10 | 77,803,550 | 100 | 97 | 10 | 161,931,708 | 20 | 23.1331 | DLH | |
| | | Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Pengujian Sampel | Jumlah Dokumen data hasil uji lingkungan | 5 | Dokumen | 1,850,000,000 | 294,209,391 | 1 | 238,629,894 | | 51,399,404 | | 43,888,552 | | 60,856,574 | 1 | 75,909,500 | 1 | 232,054,030 | 100 | 97 | 1 | 526,263,421 | 20 | 28.4467 | DLH | |
| | | Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan | Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan yang terbeli | 40 | Jenis | 5,900,000,000 | 134,428,160 | 8 | 278,000,000 | | 6,500,000 | 2 | 27,000,000 | 2 | 43,524,800 | 4 | 199,473,430 | 8 | 276,498,230 | 100 | 99 | 8 | 410,926,390 | 20 | 6.96485 | DLH | |
| | | Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah B3 | Data hasil pemantauan Limbah B3 | 5 | Dokumen | 950,000,000 | | 1 | 80,000,000 | | - | 105,263 | | 37,569,000 | | 3,580,000 | 1 | 34,600,000 | 1 | 75,854,263 | 100 | 95 | 1 | 75,854,263 | 20 | 7.98466 | DLH |
| | | Pemantauan Kualitas Udara Ambien | Data Kualitas Udara | 24 | Kabupaten | 800,000,000 | | 6 | 93,405,000 | 2 | 30,970,000 | 3 | 56,945,000 | | 1,948,718 | 1 | 2,720,000 | 6 | 92,583,718 | 100 | 99 | 6 | 92,583,718 | 25 | 11.573 | DLH | |
| | | Bimbingan teknis pengelolaan Limba B3 | Jumlah usaha/kegiatan/masyarakat/pegawai yang meningkatkan pengetahuannya dalam pengelolaan Limbah B3 | 160 | Orang | 600,000,000 | | 30 | 55,000,000 | | - | 30 | 45,151,900 | | - | | 9,558,100 | 30 | 54,710,000 | 100 | 99 | 30 | 54,710,000 | 18.75 | 9.11833 | DLH | |
| | | Pengendalian Mutu Hasil Pegujian | Data Alat Terkalibrasi Dan Jumlah Pengujian Yang tervalidasi | 176 | Alat | 1,000,000,000 | | 44 | 116,740,806 | | - | 12 | 25,600,000 | 2 | 2,842,200 | 30 | 79,080,102 | 44 | 107,522,302 | 100 | 92 | 44 | 107,522,302 | 25 | 10.7522 | DLH | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 | 89 | | | 20 | 21 | 1.87 | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | T | | | SR | SR | | | |
| | | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | | | | | | | 388,700,000 | | 71,433,506 | | 100,598,724 | | 90,154,544 | | 119,833,193 | | | | | | | | | | |
| | | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air | Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk Pelestarian sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air | 55 | Ha | 2,000,000,000 | 726,711,900 | 1.5 | 161,700,000 | | 32580000 | 1.5 | 72,250,000 | | 9,200,000 | | 42,701,193 | 1.5 | 156,731,193 | 100 | 96.92714 | 1.5 | 883,443,093 | 2.72727 | 44.1722 | DLH | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil yang tersusun | 1 | Dokumen | 82,000,000 | 79,639,300 | 1 | - | | - | | | | | | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 79,639,300 | 0 | 97.1211 | DLH | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun (2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | | |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---|------------|---|-------------|---|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----|-----------|
| | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | K | Rp. (000) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK | Laporan Inventarisasi GRK | 5 | Dokumen | 1,400,000,000 | | 123,833,143 | 1 | 109,350,000 | | 1,464,115 | | 17828724 | | 48,379,544 | 1 | 40,520,000 | 1 | 108,192,383 | 100 | 98.94137 | 1 | 232,025,526 | 20 | 16.5733 | DLH | |
| | | Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) | Jumlah Desa mandiri peduli lingkungan | 35 | Desa Peduli Lingkungan | 1,000,000,000 | | 77,205,635 | 3 | 117,650,000 | 1 | 37,389,391 | 1 | 10,520,000 | | 32,575,000 | 1 | 36,612,000 | 3 | 117,096,391 | 100 | 99.52944 | 3 | 194,302,026 | 8.57143 | 19.4302 | DLH | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 98.47 | | | 10.43 | 59.10 | 19.70 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | SR | R | | | | |
| | | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | 877,000,000 | | 19,371,246 | | 46,080,000 | | 90,460,500 | | 612,940,188 | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan DIKPLHD dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat | Jumlah Dokumen DIKPLHD dan IKLH yang dihasilkan | 10 | Dokumen | 777,000,000 | | 123,583,024 | 2 | 52,000,000 | | 7,975,263 | 1 | 20,010,000 | | 4,225,000 | 1 | 7,660,000 | 2 | 39,870,263 | 100 | 76.67358 | 2 | 163,453,287 | 20 | 21.0365 | DLH | |
| | | Penyusunan Dokumen Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Jumlah Dokumen RPPLH Yang tersusun | 5 | Dokumen | 1,820,000,000 | | 134,474,740 | 1 | 350,000,000 | 0 | 1,630,383 | | 9,800,000 | | 80,625,500 | 1 | 213,436,700 | 1 | 305,492,583 | 100 | 87.2836 | 1 | 439,967,323 | 20 | 24.174 | DLH | |
| | | Evaluasi Penyusunan KLHS | Pelaksanaan evaluasi dokumen KLHS | 4 | Dokumen | 400,000,000 | | | 1 | 75,000,000 | 0 | 9,765,600 | | 16,270,000 | | 5,610,000 | 1 | 37,980,000 | 1 | 69,625,600 | 100 | 92.83413 | 1 | 69,625,600 | 25 | 17.4064 | DLH | |
| | | Penyusunan KLHS | Jumlah Dokumen KLHS Yang dihasilkan dokumen KLHS | 2 | Dokumen | 750,000,000 | | 478,423,000 | 1 | 400,000,000 | 0 | - | | - | | - | 1 | 353,863,488 | 1 | 353,863,488 | 100 | 88.46587 | 1 | 832,286,488 | 50 | 110.972 | DLH | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 86.31 | | | 28.75 | 43.40 | 21.70 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | T | | | SR | SR | | | | |
| | | Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut | | | | | | | | 331,011,136 | | 17,097,464 | | 63,584,872 | | 12,614,616 | | 232,870,000 | | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut | Luas lahan kritis wilayah pesisir dan Laut yang tertutupi dengan Tanaman Mangrove (Peningkatan Indeks Kualitas Lahan) | 87 | Ha | 9,239,500,000 | | 339,223,771 | 4 | 331,011,136 | | 17,097,464 | | 63,584,872 | | 12,614,616 | 4 | 232,870,000 | 4 | 326,166,952 | 100 | 98.53655 | 4 | 665,390,723 | 4.5977 | 7.20159 | DLH | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 98.54 | | | 4.60 | 7.20 | 7.20 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | SR | SR | | | | |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | 359,212,680 | | 21,486,603 | | 141,742,000 | | 30,212,718 | | 137,558,668 | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Program Sekolah Peduli Lingkungan | Jumlah Sekolah Sekolah Peduli Lingkungan | 75 | Sekolah | 2,300,000,000 | | 161,667,273 | 10 | 123,950,000 | 2 | 12,486,603 | 3 | 38,152,000 | 2 | 24,062,718 | 3 | 47,234,000 | 10 | 121,935,321 | 100 | 98.3746 | 10 | 283,602,594 | 13.3333 | 12.3305 | DLH | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019) | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun (2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. | K | Rp. (000) | K | Rp. | |
| | | | | ### | kader | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Saka KALPATARU | Jumlah kader Lingkungan hidup yang aktif | 5 | 1,550,000,000 | | | 4006 | 113,900,000 | | 7,000,000 | | 8,380,000 | | 6,150,000 | 4006 | 90,324,668 | 100 | 98.20427 | 4006 | 111,854,668 | 24.6903 | 7.21643 | DLH |
| | | Expose/Promosi Upaya Penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam | Penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi | 5 | 2,100,000,000 | | - | 2 | 121,362,680 | | 2,000,000 | 1 | 95,210,000 | | - | 1 | 97,210,000 | 50 | 80.09876 | 1 | 97,210,000 | 20 | 4.62905 | DLH |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.33 | 92.23 | | | 29.01 | 12.09 | 6.04 | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | T | ST | | | SR | SR | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | 5,729,539,815.62 | | 680,387,953 | | 1,019,307,184 | | 1,005,623,961 | | ##### | 5,498,008,000 | | | | | | |
| Total Realisasi | | | | | | | | | 5,498,008,000 | 95.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11) | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.59 | 95.96 | | | 17.73 | 24.29 | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11) | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | | SR | SR | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :

*) coret yang tidak perlu

*) coret yang tidak perlu

keterangan ; skala Nilai Peringkat Kinerja

91 % < 100 % Sangat Tinggi

76 % < 90 % Tinggi

66 % < 75 % Sedang

51 % < 65 % Rendah

< 50 % Sangat Rendah

Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

A.Aco Takdir S.Sos, M.Pd

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19670702 199103 1 011

Disusun,

Mamuju, Desember 2019

KASUBAG PROGRAM & KEUANGAN DLH

PROVINSI SULAWESI BARAT

ST. FATIMAH B., SE, MM

Pangkat : Penata TK. I

Nip : 19761128 200212 2 007

Tabel 2.2

**EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT | TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD) | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3) | TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) | | | TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | TARGET RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | REALISASI RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11 | 12 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah | 100 | Op | 12 Bulan, 20 OP | 20 OP | 20 OP | 100% | 20 OP | 12 Bulan, 60 OP | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah | 100 | Op | 12 Bulan, 20 OP | 20 OP | 20 OP | 100% | 20 OP | 12 Bulan, 60 OP | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang terbeli | 35 | Jenis | 12 Bulan, 7 Jenis | 9 jenis | 9 jenis | 100% | 0 | 12 Bulan, 16Jenis | 45.71 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis ATK yang terbeli | 235 | Jenis | 12 Bulan, 47 Jenis | 47 Jenis | 47 Jenis | 100% | 47 Jenis | 12 Bulan, 141 Jenis | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbeli | 10 | Bahan Bacaan | 12 Bulan, 2 Bahan Bacaan | 5 Bahan Bacaan | 0 Bahan Bacaan | 0% | 2 Bahan Bacaan | 12 Bulan, 4 Bahan Bacaan | 40 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terbeli | 35 | Jenis | 12 Bulan, 7 Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | 100% | 0 | 12 Bulan, 12 Jenis | 34.29 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening Terbayarkan | 180 | Rekening/Bulan | 12 Bulan, 36 Rekening/Bulan | 36 Rekening/Bulan | 36 Rekening/Bulan | 100% | 36 Rekening/Bulan | 12 Bulan, 108 Rekening Bulan | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah bahan makan minum yang terbeli | 25 | Jenis | 12 Bulan, 5 Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | 100% | 8 Jenis | 12 Bulan, 16 Jenis | 64 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang terbeli | 25 | Jenis | 12 Bulan, 5 Jenis | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 Bulan, 5 Jenis | 20 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang cetak dan Penggandaan yang tersedia | 72 | Bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66.67 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Yang Terkirim | 72 | Bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66.67 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Rata rata capaian kinerja | | | | | | | 82% | | | 52.48 | |
| | Predikat Kinerja | | | | | | | T | | | R | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT | TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD) | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3) | TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) | | | TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | TARGET RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | REALISASI RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11 | 12 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli | 9 | Unit | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 33.33 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Meubeleur Kantor dan Laboratorium yang terbeli | 40 | Unit | 12 Bulan, 8 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100% | 2 Unit | 12 Bulan, 12 Unit | 30 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara | 90 | Unit | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 | 45 | 50.00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor | Terpeliharanya Peralatan gedung kantor secara rutin/berkala | 72 | Bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66.67 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah kendaraan operasional dan mobil jabatan yang terpelihara | 36 | unit | 12 | 6 | 6 | 100% | 6 | 24 | 66.67 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Kantor terbeli | 23 | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala | 48 | Bulan | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 50.00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala | 72 | Bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66.67 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Rata rata capaian kinerja | | | | | | | 75% | | | 45.42 | |
| | Predikat Kinerja | | | | | | | S | | | SR | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT | TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD) | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3) | TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) | | | TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | TARGET RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | REALISASI RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11 | 12 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kepatuhan Aparatur | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terbeli | 400 | Pakaian | 1 Paket, 80 Pakaian | 0 | 0 | 0% | 83 | 1 Paket, 163 Pakaian | 40.75 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang terbeli | 400 | Pakaian | 80 | 83 | 83 | 100% | 0 | 163 | 40.75 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Rata rata capaian kinerja | | | | | | | 50% | | | 40.75 | |
| | Predikat Kinerja | | | | | | | SR | | | SR | |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangny | | | | | | | | | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkatkan Kapasitasnya | 95 | Ok | 12 Bulan, 15 OK | 20Ok | 20Ok | 100% | 7 | Ok | 44.21 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan | Jumlah Peraturan Perundang - undangan terbaru yang di sosialisasi | 4 | Peraturan Perundang - undangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Rata rata capaian kinerja | | | | | | | 50% | | | 22.11 | |
| | Predikat Kinerja | | | | | | | SR | | | SR | |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD yang terlaksana | 30 | Kabupaten | 1 Tahun, 6 Kabupaten | 6 Kabupaten | 6 Kabupaten | 100% | 6 | Kabupaten | 60.00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan RKA/DPA SKPD | Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD tersusun | 11 | Dokumen | 3 | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 63.64 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan Renstra SKPD | Jumlah dokumen RENSTRA SKPD tersusun | 2 | Dokumen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 50 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan RKA-P/DPA-P SKPD | Jumlah dokumen RKA-P/DPA SKPD tersusun | 11 | Dokumen | 3 | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 63.64 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun | 5 | laporan | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT | TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD) | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3) | TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) | | | TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | TARGET RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | REALISASI RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11 | 12 |
| | Forum SKPD | Jumlah program dan kegiatan yang disepakati sesuai Program/kegiatan Prioritas | 350 | Program/kegiatan | 70 | 70 | 70 | 100% | 70 | 210 | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | 20 | Laporan | 12 Bulan, 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% | 4 Laporan | 12 Bulan, 12 Laporan | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | 8 | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Rata rata capaian kinerja | | | | | | | 75% | | | 52.16 | |
| | Predikat Kinerja | | | | | | | S | | | R | |
| 6 | Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut | Peningkatan Indeks Tutupan Lahan | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut | Luas lahan kritis wilayah pesisir dan Laut yang tertutupi dengan Tanaman Mangrove (Peningkatan Indeks Kualitas Lahan) | 113.21 | Ha | 30.21 | 7.1 | 4 | 56% | 2 | 36.21 | 31.98 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Inventarisasi data dan pembuatan peta kerusakan | 1 | Dokumen & Peta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah kelompok masyarakat pelestari lingkungan yang dibina | 5 | Kelompok masyarakat pelestari mangrove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Rata rata capaian kinerja | | | | | | | 56% | | | 31.98 | |
| | Predikat Kinerja | | | | | | | R | | | SR | |
| 7 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah diwilayah Provinsi | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | | | | | | | | | | |
| | Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA | Jumlah aparatur dan masyarakat yang Meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Sampah dan TPA | 400 | Orang | 200 | 50 | 50 | 100% | 0 | 250 | 62.50 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sampah yang dihasilkan | 2 | dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Peserta HPSN | 1000 | Orang | 400 | 200 | 200 | 100% | 200 | 800 | 80 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan persampahan | Jumlah aparatur dan masyarakat yang terbina dalam pengelolaan sampah terpadu | 210 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 57.14 | Dinas Lingkungan Hidup |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SARANAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT | TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD) | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3) | TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) | | | TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGAB JAWAB |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | TARGET RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | REALISASI RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11 | 12 |
| | | Jumlah Dokumen Inventarisasi dan pengawasan sampah terpadu | 1 | Dok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyediaan dan Pengembangan sarana prasana teknologi pengelolaan sampah | Jumlah Unit pengelolaan sampah | 4 | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Rata rata capaian kinerja | | | | | | | 40% | | | 59.93 | |
| | Predikat Kinerja | | | | | | | SR | | | SR | |
| 9 | Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup | Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA | | | | | | | | | | |
| | | Terverifikasinya MHA dan Kearifan lokal pengetahuan tradisional | | | | | | | | | | |
| | | Penetapan Hak MHA | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan keterampilan | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pengembangan program sekolah peduli lingkungan (ADIWIYATA) | Jumlah Sekolah Sekolah Peduli Lingkungan | 85 | Sekolah | 25 | 10 | 10 | 100% | 15 | 50 | 58.82 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Expose/Promosi upaya penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam | Upaya penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam yang di Expose/promosikan | 10 | Ekspose | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 40 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Saka Kalpataru | Jumlah kader lingkungan hidup yang aktif | 16,225 | kader lingkungan Hidup | 0 | 4006 | 40 | 1% | 4006 | 4046 | 24.94 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penilaian Kalpataru | 50 | Ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50.00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen MHA yang di inventarisir | 1 | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA | 1 | kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Terverifikasinya MHA dan Kearifan lokal pengetahuan tradisional | 1 | kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Penetapan Hak MHA | 1 | kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLH |
| | | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan keterampilan | 1 | kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Rata rata capaian kinerja | | | | | | | 50% | | | 68.44 | |
| | Predikat Kinerja | | | | | | | SR | | | S | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT | TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD) | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3) | TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) | | | TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPDP TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | TARGET RKPDP TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | REALISASI RKPDP TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11 | 12 |
| 10 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Peningkatan Indeks Tutupan Lahan | | | | | | | | | | |
| | | Laporan Inventarisasi GRK | | | | | | | | | | |
| | | Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Profil Kehati, Rencana Induk Pengelolaan Kehati dan Penentuan kawasan bernilai penting | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan pengelolaan Kehati daerah yang dihasilkan | 4 | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah Dokumen Pemantauan Perlindungan sumber daya alam | 2 | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dan pengembangan sistem informasi kehati | Konservasi Kehati Daerah | 6 | Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Pengembangan sistem informasi kehati | 10 | kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pemantauan dan Pengawasan akses lahan terbuka akibat pertambangan serta pembuatan peta lahan kritis | Jumlah Data kerusakan wilayah tambang | 4 | Dok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan kriteria baku kerusakan lingkungan | Jumlah Penetapan kebijakan pengelolaan Sumber daya alam | 5 | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Gerakan Pembaharuan Sulbar Hijau (GPSH) | Penambahan Tutupan Lahan dengan Tanaman Produktif | 35.4 | Ha | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 100.00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air | jumlah titik daerah tangkapan air | 2200 | Titik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | jumlah titik konservasi tangkapan air dan sumber-sumber air | 11 | titik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | Laporan Inventarisasi GRK | 5 | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 60 | DLH |
| | Pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim) | Jumlah Desa mandiri peduli lingkungan | 35 | Desa Peduli Lingkungan | 1 | 3 | 3 | 100 | 7 | 11 | 31.43 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah Komite Lingkungan Hidup | 28 | KomiteLingkungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 25.00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah data GRK dan Proklm | 1 | Dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | DLH |
| | Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air | Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk Pelestarian sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air | 109.4 | Ha | 47.67 | 1.5 | 1.5 | 100 | 2 | 51.17 | 46.77 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah Dokumen Profil Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Dokumen kerusakan sumber-sumber air | 1 | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Rata rata capaian kinerja | | | | | | | 60.00 | | | 47.64 | |
| | Predikat Kinerja | | | | | | | R | | | SR | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT | TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD) | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3) | TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) | | | TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | TARGET RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | REALISASI RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11 | 12 |
| 13 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Peningkatan Indeks Kualitas Air | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Indeks Kualitas Udara | | | | | | | | | | |
| | | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas Kabupaten/kota yang ditangani | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Limbah B3 yang dikelola | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA | Jumlah Kota yang dilakukan Pemantauan Adipura | 20 | Kab/Kota | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 12 | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pemberian Penghargaan Lingkungan | Penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi | 1 | kegiatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan | Penghargaan kepada masyarakat | 1000 | Orang | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 600 | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pemantauan kualitas air sungai lintas kabupaten | Data Kualitas Air Sungai | 20 | Sungai | 4 | 3 | 3 | 100 | 5 | 12 | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pemantauan Kualitas Udara Ambien | Data Kualitas Udara | 24 | Kab | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 12 | 50 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pemantauan Kualitas Air Laut | Data Kualitas Air laut | 25 | kab | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) | Data Perusahaan dalam Mengelola Lingkungan Hidup | 46 | Perusahaan | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30.43 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan Pergub Tata Cara Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | Jumlah dokumen Pergub Tata Cara Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Pengrusakan LH yang dihasilkan | 2 | Dokumen Pergub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pengelolaan Pos P3SLH | Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani | 56 | Kasus lingkungan (Provinsi dan Kabupaten) | 16 | 10 | 10 | 100 | 10 | 36 | 64.29 | Dinas Lingkungan Hidup |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT | TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD) | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3) | TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) | | | TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | TARGET RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | REALISASI RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11 | 12 |
| | Sosialisasi tata cara pengaduan dan Pengelolaan Pengaduan LH | Jumlah SDM Aparatur, Stakeholders dan Masyarakat ditingkatkan kapasitas dan pengetahuannya dalam tata cara pengaduan dan Pengelolaan Pengaduan LH | 480 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Bimbingan Tekis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup | Jumlah SDM Aparatur ditingkatkan kapasitas dan pengetahuannya dalam tata cara penyelesaian sengketa LH | 225 | Ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani | 4 | sengketa lingkungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pengawasan Izin lingkungan dan Izin PPLH | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi | 85 | usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan | 10 | 15 | 15 | 100 | 20 | 45 | 52.94 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan lingkungan hidup | 50 | OK (PPLH dan Calon PPLH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penegakan hukum lingkungan hidup | Peningkatan Kapasitas dan Penanganan dalam penegakan hukum lingkungan hidup | 6 | Kegiatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Peningkatan kapasitas dan kinerja laboratorium | Meningkatnya kapasitas kinerja Laboratorium | 50 | Orang | 20 | 10 | 10 | 100 | 0 | 30 | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan | Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan yang terbeli | 40 | Jenis | 8 | 9 | 9 | 100 | 0 | 17 | 42.5 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pengadaan sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup | Sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup | 1 | paket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT | TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD) | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3) | TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) | | | TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | TARGET RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | REALISASI RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11 | 12 |
| | Pengendalian Mutu Hasil Pengujian | Data Alat Terkalibrasi Dan Jumlah Pengujian Yang tervalidasi | 176 | Alat | 0 | 44 | 44 | 100 | 44 | 88 | 50 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Pengujian Sampel | Jumlah Dokumen data hasil uji lingkungan | 5 | 5 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan PERGUB tentang pendapatan daerah bukan pajak dari kegiatan laboratorium | PERGUB tentang pendapatan daerah bukan pajak dari kegiatan laboratorium yang tersusun | 1 | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Sosialisasi Jasa Pelayanan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan | Jumlah Aparatur, SDM dan Stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Jasa Pelayanan Laboratorium | 200 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Inventarisasi usaha/kegiatan Amdal, UKL-UPL, DPLH dan DELH | Jumlah Dokumen Laporan Data inventarisasi yang dihasilkan | 5 | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 40.00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Daerah | Jumlah Komisi Penilai Amdal yang terbina | 25 | Komisi Penilai Amdal Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah Anggota Komisi Yang terbina | 35 | OK | 35 | 35 | 35 | 100 | 0 | 35 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah Komisi Penilai Amdal yang dimonitoring dan dievaluasi | 10 | Komisi Penilai Amdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Bimbingan Teknis Tata Laksana Penilaian Amdal dan Izin Lingkungan | Jumlah KPA yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penilaian Amdal dan Izin Lingkungan | 280 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Bimbingan teknis Evaluasi Laporan RKL-RPL | Jumlah KPA dan pemrakarsa usaha/ kegiatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Evaluasi Laporan RKL-RPL | 60 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pemantauan RKL-RPL di Daerah | Jumlah Dokumen Pemantauan RKL-RPL di | 4 | Dok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan Pergub Pengelolaan Limbah B3 Skala Provinsi | Jumlah Dokumen Pergub Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan | 3 | dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah B3 | Data hasil pemantauan limbah B3 | 4 | Dok | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | Dinas Lingkungan Hidup |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT | TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD) | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3) | TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) | | | TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | TARGET RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | REALISASI RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11 | 12 |
| | Inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi izin pengelolaan limbah B3 | Jumlah Dokumen Inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi izin pengelolaan limbah B3 | 4 | Dok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Bimbingan teknis pengelolaan Limbah B3 | Jumlah usaha/kegiatan/masyarakat/pe- gawai yang meningkat pengetahuannya dalam pengelolaan Limbah B3 | 120 | OK | 0 | 30 | 30 | 100 | 0 | 30 | 25 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Rata rata capaian kinerja | | | | | | | 100 | | | 74.42 | |
| | Predikat Kinerja | | | | | | | ST | | | S | |
| 15 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan data dan informasi lingkungan | Jumlah papan Informasi Lingkungan yang terpasang | 400 | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah sistem informasi lingkungan | 1 | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan PDRB Hijau | Jumlah Dokumen PDRB Hijau Sulawesi Barat yang dihasilkan | 1 | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan Dokumen SLHD dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat | Jumlah Dokumen SLHD dan IKLH yang dihasilkan | 2 | Dokumen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Provinsi Sulawesi Barat | Jumlah Dokumen DIKPLHD dan IKLH yang dihasilkan | 10 | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 60 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan KLHS | Jumlah Dokumen KLHS Yang dihasilkan | 1 | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Evaluasi Penyusunan KLHS | Pelaksanaan Evaluasi Dokumen KLHS | 4 | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | |
| | Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan LH (NSDA dan LH) | Jumlah dokumen NSDA dan LH | 2 | dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Jumlah Dokumen RPPLH | 5 | dokumen | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Frekuensi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPPLH | 3 | kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Perencanaan PPLH | 10 | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Rata rata capaian kinerja | | | | | | | 100 | | | 60 | |
| | Predikat Kinerja | | | | | | | ST | | | R | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT | TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD) | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3) | TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) | | | TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | TARGET RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | REALISASI RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2) | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11 | 12 |
| 17 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Peningkatan Indeks Kualitas Udara | | | | | | | | | | |
| | | Tersedianya Ruang Terbuka Hijau | | | | | | | | | | |
| | Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Pemeliharaan (RTH) | Tersedianya Ruang Terbuka Hijau | 10 | Lokasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah titik RTH yang terpelihara | 7 | Titik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan RTH | 4 | kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Rata rata capaian kinerja | | | | | | | 0% | | | 0% | |
| | Predikat Kinerja | | | | | | | SR | | | SR | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

A. ACO TAKDIR, S.Sos.M.Pd
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19670702 199103 1 011

keterangan ; skala Nilai Peringkat Kinerja
91 % < 100 % Sangat Tinggi
76 % < 90 % Tinggi
66 % < 75 % Sedang
51 % < 65 % Rendah
< 50 % Sangat Rendah

Disusun,
Mamuju, Februari 2020
KASUBAG PROGRAM & KEUANGAN DLH
PROVINSI SULAWESI BARAT

Hi. ST. FATIMAH B., SE. MM
Pangkat : Pembina
Nip : 19761128 200212 2 007

**TABEL 2.3. EVALUASI RENSTRA OPD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Dengan Tahun (Tahun n-3) | Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program/Kegiatan RKPDP Tahun Berjalan (Tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Target RKPDP Tahun 2017 (Tahun n - 2) | Realisasi RKPDP Tahun 2017 (Tahun n - 2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program | Tingkat Capaian Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11 | 12 |
| | Belanja Langsung | | | | | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Jumlah pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 300% | DLH |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarkan | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 36 Rekening/Bulan | 24 Bulan, 36 Rekening Bulan | 200% | DLH |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Pelaksanaan ATK yang terbeli | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 47 Jenis | 24 Bulan, 24 Jenis | 200% | DLH |
| | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | Jumlah pelaksanaan barang Cetak dan Penggandaan yang terbeli | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 300% | DLH |
| | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan | 12 | Bulan | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 200% | DLH |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terbeli | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 7 Jenis | 24 Bulan, 7 Jenis | 200% | DLH |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga yang terbeli | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 7 Jenis | 24 Bulan, 7 Jenis | 200% | DLH |
| | Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah Pelaksanaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbeli | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 2 Bahan Bacaan | 24 Bulan, 2 Bahan Bacaan | 200% | DLH |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan makan minum | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 5 Jenis | 24 Bulan, 5 Jenis | 200% | DLH |
| | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah Pelaksanaan perjalanan luar daerah | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 20 OP | 24 Bulan, 20 OP | 200% | DLH |
| | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah Pelaksanaan perjalanan dalam daerah | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 20 OP | 24 Bulan, 20 OP | 200% | DLH |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Meubeleur | jumlah pelaksanaan Meubeleur terbeli | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 8 Jenis | 24 Bulan, 8 Jenis | 200% | DLH |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah kendaraan operasional dan mobil jabatan yang terpelihara | 6 | Unit | 1 Tahun | 6 | 6 | 100% | 6 | 1 Tahun, 12 Unit | 200% | DLH |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Dengan Tahun (Tahun n-3) | Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program/Kegiatan RKPDP Tahun Berjalan (Tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Target RKPDP Tahun 2017 (Tahun n - 2) | Realisasi RKPDP Tahun 2017 (Tahun n - 2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program | Tingkat Capaian Realisasi | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara | 15 | Unit | 1 Tahun | 15 | 15 | 100% | 15 | 1 Tahun, 30 Unit | 200% | DLH |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 300% | DLH |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 300% | DLH |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terbeli | 1 | Paket | 1 Tahun | 1 | 1 | 100% | 80 Pakaian | 1 Tahun, 1 Paket, 80 Pakaian | 100% | DLH |
| | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang terbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80 Pakaian | 80 Pakaian | 0% | DLH |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pelaksanaan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 12 | Bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 15 Ok | 24 Bulan, 15 Ok | 200% | DLH |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun | 1 | Laporan | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 6 | 600% | DLH |
| | Penyusunan Renstra | Jumlah dokumen Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD tersusun | 1 | Dokumen | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | DLH |
| | Penyusunan RKA/DPA - SKPD | Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD tersusun | 2 | Dokumen | 1 | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 250% | DLH |
| | Penyusunan RKA-P/DPPA - SKPD | Jumlah dokumen RKA-P/DPPA SKPD tersusun | 2 | Dokumen | 1 | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 250% | DLH |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kinerja program dan kegiatan SKPD | 1 | Tahun | - | 1 | 1 | 100% | 6 Kabupaten | 1 Tahun, 6 Kabupaten | 100% | DLH |
| | Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 1 Laporan | 1 Laporan | 0% | DLH |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Dengan Tahun (Tahun n-3) | Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program/Kegiatan RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Target RKPd Tahun 2017 (Tahun n - 2) | Realisasi RKPd Tahun 2017 (Tahun n - 2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program | Tingkat Capaian Realisasi | |
| | Forum SKPD | Jumlah Program dan Kegiatan yang disepakati sesuai Program/kegiatan Prioritas | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 70 Program/Kegiatan | 70 Program/Kegiatan | 0% | DLH |
| Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Terjalannya Koordinasi Penilaian kota sehat/Adipura | 4 | kab/kota | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 12 | 300% | DLH |
| | Pengelolaan Pos P3SLH | Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani | 6 | Pengaduan | 6 | 6 | 6 | 100% | 10 | 22 | 367% | DLH |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup | Jumlah Sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup | 1 | Paket | 1 | 1 | 1 | 100% | - | 2 | 200% | DLH |
| | Penegakan Hukum Lingkungan Hidup | Peningkatan Kapasitas dalam penegakan hukum lingkungan hidup | 1 | Kegiatan | - | 1 | 1 | 100% | - | 1 | 100% | DLH |
| | Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten | Tersedianya Data Kualitas Air Sungai | 2 | Sungai | - | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 200% | DLH |
| | Peningkatan kapasitas dan kinerja laboratorium | Meningkatnya Kapasitas Kinerja Laboratorium | 1 | Kegiatan | - | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 200% | DLH |
| | Permantauan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Mengelola Lingkungan Hidup (PROPER) | Data Perusahaan dalam Mengelola Lingkungan Hidup | 4 | kab/kota | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 13 | 325% | DLH |
| | Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Penguji Sampel | Jumlah Dokumen Data Hasil Uji Lingkungan | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0% | DLH |
| | Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan | Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Yang Terbeli | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 8 Jenis | 8 Jenis | 0% | DLH |
| | Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Daerah | Jumlah Anggota Komisi yang Terbina | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 35 Ok | 35 Ok | 0% | DLH |
| Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem | Konservasi Kehati Daerah | 1 | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 200% | DLH |
| | Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Terlaksananya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 1 | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 200% | DLH |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Dengan Tahun (Tahun n-3) | Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program/Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Target RKPD Tahun 2017 (Tahun n - 2) | Realisasi RKPD Tahun 2017 (Tahun n - 2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program | Tingkat Capaian Realisasi | |
| | Inventarisasi usaha/kegiatan Amdal, UKL-UPL, DPLH dan DELH | Jumlah Dokumen Laporan Data inventarisasi yang dihasilkan | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 300% | DLH |
| | | | | | | | | | | | | |
| Program Inventarisasi Data dan Informasi Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan SLHD dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat | Jumlah Dokumen SLHD dan IKLH yang dihasilkan | 2 | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 300% | DLH |
| | Penyusunan KLHS | Jumlah Dokumen KLHS Yang Tersusun | 1 | Dokumen | - | 1 | 1 | 100% | - | 1 | 100% | DLH |
| | Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Jumlah Dokumen RPPLH yang Tersusun | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0% | DLH |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

BAB III**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Arah kebijakan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sesuai dengan 5 arahan utama Presiden, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyerdehanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Adapun agenda pembangunan/prioritas Nasional, sebagai berikut :

- Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan.
- Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
- SDM berkualitas dan berdaya saing.
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
- Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Untuk mendukung tercapainya prioritas nasional maka Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyusun arah kebijakan dengan 2 kerangka besar yaitu Mengurangi beban lingkungan; dan Aktualisasi potensi SDH untuk mendukung sumbangan sektor kehutanan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai Kementerian dalam meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sebagaimana pada tahun 2019 ditargetkan IKLH sebesar 66,5- 68,5 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dan RKPD, melalui penyusunan

rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta sinergi antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (korelasi) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD), sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Gubernur. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, isu-isu strategis RPJPD Sulbar 2005-2025 dan isu-isu strategis dan penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD. Adapun tema pembangunan daerah Tahun 2021 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2021 adalah “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Tujuan rencana kerja disusun untuk menjabarkan lebih lanjut visi dan misi yang disusun lebih detail, realistis dan dilengkapi oleh sasaran yang terukur dan dapat dicapai pada periode yang direncanakan. Tujuan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, yaitu meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup daerah. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam renja 2021, yaitu : Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara

Dan Meningkatkan Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan Lahan Kritis Dan Sumber-Sumber Air.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 berdasarkan pada Perubahan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. Perubahan Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan. Arah kebijakan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 salah satu misi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Misi V mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Adapun indikator kinerja yang akan dicapai dalam misi V adalah Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) dan Penurunan Lahan Kritis. Selain berpedoman pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, penyusunan program kegiatan Tahun 2021, didasarkan pada target capaian SDGs dan pencapaian indikator kinerja kunci tataran pelaksanaan kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dalam rangka EKPPD. Berdasarkan pada aplikasi simda perencanaan pada Tahun 2021 terdapat 11 program yang akan dilaksanakan, yang akan dipetakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan melaksanakan 12 program, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

6. Program Pengelolaan dan Rehabilitas ekosistem pesisir dan laut
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
10. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup
11. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dari 12 program diatas, diturunkan menjadi 58 kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020. Adapun kegiatan dimaksud antara lain:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
13. Pengadaan Meubeleur
14. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan
16. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
19. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
20. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
21. Pendidikan dan Pelatihan Formal
22. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
25. Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD
26. Penyusunan RKA/DPA-SKPD
27. Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
28. Monitoring dan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan SKPD
29. Penyusunan dokumn perencanaan SKPD
30. Forum SKPD
31. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
32. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA
33. Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengeolaan persampahan
34. Penyediaan dan Pengembangan sarana prasana teknologi pengelolaan Sampah
35. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
36. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
37. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
38. Inventarisasi Usaha/Kegiatan Amdal, UKL-UPL, DPLH dan DELH
39. Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH
40. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
41. Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten
42. Pemantauan Kualitas Air Laut
43. Peningkatan kapasitas dan kinerja labolatorium
44. Pengelolaan POS P3SLH

45. Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan
46. Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Daerah
47. Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah B3
48. Bimbingan teknis pengeolaan Limbah B3
49. Inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi izin pengelolaan limbah B3
50. Pemantauan RKL-RPL di Daerah
51. Bimbingan teknis Evaluasi Laporan RKL – RPL
52. Bimbingan Teknis Tata Laksana Penilaian Amdal dan Izin Lingkungan
53. Sosiasasi Jasa Pelayanan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan
54. Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Pengujian Sampel
55. Pengendalian Mutu Hasil Pengujian
56. Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup
57. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
58. Pemantauan Kualitas Udara Ambien
59. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
60. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
61. Penyusunan Profil Kehati, Rencana Induk Pengelolaan Kehati dan Penentuan kawasan bernilai penting
62. Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK
63. Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan
64. Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim)
65. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dan pengembangan sistem informasi kehati
66. Pemantauan dan Pengawasan akses lahan terbuka akibat pertambangan serta pembuatan peta lahan kritis
67. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
68. Penyusunan DIKPLHD dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat
69. Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

- Lingkungan Hidup (RPPLH)
70. Evaluasi Penyusunan KLHS
 71. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan LH (NSDA dan LH)
 72. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 73. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
 74. Penataan RTH
 75. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
 76. Pengembangan Program Sekolah Peduli Lingkungan
 77. Saka KALPATARU
 78. Expose/Promosi Upaya Penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam
 79. Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun jumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, yaitu 11 Program, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
8. Program Pengelolaan Persampahan
9. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Adapun kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, sebagai berikut ;

1. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum
4. Administrasi Keuangan
5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
6. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
7. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
8. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
9. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
10. Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
11. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
12. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
13. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
14. Penanganan Sampah di TPA/TPST regional
15. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
16. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
17. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL. 4. 1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD | 4 | 3,165,916,750 | | | 4 | 2,880,710,000 |
| | | | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup DLH | 62% | 199,328,400 | | | 62% | 5,840,655,685 |
| | | | Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai | 72% | 795,450,000 | | | 72% | 827,450,000 |
| 1.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD | 88 | 644,491,000 | | | 89.85 | 330,000,000 |
| 1.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Provinsi | Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang tersusun | 2 | 114,712,380 | DAU | | 2 | 50,000,000.00 |
| 1.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Provinsi | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun | 4 | 89,999,840 | DAU | | 4 | 75,000,000.00 |
| 1.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Provinsi, 6 Kabupaten | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun | 4 | 99,999,920 | DAU | | 4 | 75,000,000.00 |

RENJA DLH PROV. SUL-BAR TAHUN 2021

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Provinsi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | 72 | 89,999,840 | DAU | | 72 | 80,000,000.00 |
| 1.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi | jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah | 6 | | 249,779,020 | DAU | | 6 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan | | Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DLH | 90% | 99,999,920 | | | 90% | 5,690,655,685 |
| | | | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup DLH | 90% | 99,328,480 | | | 95% | 150,000,000 |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Provinsi | Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya | 1 | | DAU | | 1 | 5,615,655,685.00 |
| 1.2.2 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Provinsi | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun | 3 | 99,999,920 | DAU | | 3 | 75,000,000.00 |
| 1.2.3 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Provinsi | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun | 12 | 49,664,240 | DAU | | 12 | 75,000,000.00 |
| 1.2.4 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Provinsi | Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun | 1 | 49,664,240 | DAU | | 1 | 75,000,000.00 |
| 1.3 | Administrasi Umum | | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DLH | 90% | 2,521,425,750.00 | | | 95% | 2,550,710,000.00 |
| 1.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Provinsi | Persentase Surat Menyurat yang Dikelola | 250 | 70,000,000 | DAU | | 250 | 95,000,000.00 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Provinsi | Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan | 36 | 153,675,200 | DAU | | 36 | 120,000,000.00 |
| 1.3.3 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Provinsi | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan | 47 | 74,999,740 | DAU | | 47 | 75,000,000.00 |
| 1.3.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Provinsi | Jumlah Jenis Barang yang Dicitak | 36 | 10,000,000 | DAU | | 36 | 18,000,000.00 |
| 1.3.5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Provinsi | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 | 9,999,700 | DAU | | 5 | 10,000,000.00 |
| 1.3.6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Provinsi | Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan | 1 | 156,785,750.00 | DAU | | 1 | 15,000,000.00 |
| 1.3.7 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Provinsi | Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 | 30,020,000 | DAU | | 5 | 50,000,000.00 |
| 1.3.8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Provinsi | Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan | 5 | 17,270,000 | DAU | | 5 | 36,000,000.00 |
| 1.3.9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Provinsi | Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan | 6 | 74,987,000 | DAU | | 6 | 81,420,000.00 |
| | | Provinsi | Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan | 6 | | DAU | | 6 | 50,000,000.00 |
| 1.3.10 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Provinsi, Luar Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah | 20 | 349,999,560 | DAU | | 20 | 399,500,000.00 |

RENJA DLH PROV. SUL-BAR TAHUN 2021

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|--------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1.3.11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah | 25 | 299,428,800 | DAU | | 25 | 300,000,000.00 |
| 1.3.12 | Pengadaan Mobil Jabatan | Provinsi | Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan | 1 | 476,100,000 | DAU | | 1 | 500,000,000.00 |
| 1.3.13 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Provinsi | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan | 4 | 149,980,000 | DAU | | 4 | 500,000,000.00 |
| 1.3.14 | Pengadaan Mebeleur | Provinsi | Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan | 5 | 184,412,000 | DAU | | 3 | 37,000,000.00 |
| 1.3.15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Provinsi | Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor | 2 | 99,888,000 | DAU | | 2 | 13,040,000.00 |
| 1.3.16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Provinsi | Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan | 6 | 189,560,000 | DAU | | 6 | 170,000,000.00 |
| 1.3.17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Provinsi | Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 15 | 49,326,000 | DAU | | 15 | 48,750,000.00 |
| 1.3.18 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Provinsi | Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor | 4 | 74,994,000 | DAU | | 4 | 16,000,000.00 |
| 1.3.19 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Provinsi | Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | 4 | 50,000,000 | DAU | | 4 | 16,000,000.00 |
| 1.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup DLH | 100% | 191,250,000.00 | | | 100% | 191,250,000.00 |

RENJA DLH PROV. SUL-BAR TAHUN 2021

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup DLH | 100% | 604,200,000.00 | | | 100% | 636,200,000.00 |
| 1.4.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Provinsi | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan | 85 | 63,750,000.00 | DAU | | 85 | 63,750,000.00 |
| 1.4.2 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Provinsi | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan | 85 | 63,750,000.00 | DAU | | 85 | 63,750,000.00 |
| 1.4.3 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Provinsi | Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan | 85 | 63,750,000.00 | DAU | | 85 | 63,750,000.00 |
| 1.4.4 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Provinsi, Luar Daerah | Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 55 | 325,000,000.00 | DAU | | 55 | 447,000,000.00 |
| 1.4.5 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Provinsi | Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 100% | 50,000,000.00 | DAU | | 100% | 5,000,000.00 |
| | | Provinsi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 55 | 89,600,000.00 | DAU | | 55 | 89,600,000.00 |
| 1.4.6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Provinsi | Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 100% | 50,000,000.00 | DAU | | 100% | 5,000,000.00 |
| | | Provinsi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 55 | 89,600,000.00 | DAU | | 55 | 89,600,000.00 |

RENJA DLH PROV. SUL-BAR TAHUN 2021

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 2 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan lingkungan hidup | 100% | 1,232,226,820 | | | 100% | 1,319,340,000 |
| 2.1 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | | Cakupan dokumen Pengendalian RPPLH yang tersusun | 4 Dokumen | 1,133,827,880 | | | 4 Dokumen | 968,930,000 |
| 2.1.1 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi | Provinsi | Jumlah Dokumen RPPLH Yang tersusun | 2 Dokumen | 545,863,060 | DAU | | 2 Dokumen | - |
| 2.1.2 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | Provinsi | Jumlah DIKPLH dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat | 2 Dokumen | 137,999,280.00 | DAU | | 2 Dokumen | 368,930,000.00 |
| | | Provinsi | Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat | 1 Dokumen | 350,000,000.00 | DAU | | 1 Dokumen | 200,000,000.00 |
| | | Provinsi | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan | 20 Orang | 99,965,540 | DAU | | 20 Orang | 400,000,000.00 |
| 2.2 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | | Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji oleh provinsi | 4 KLHS | 98,398,940 | | | 4 KLHS | 350,410,000 |
| 2.2.1 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Provinsi | Jumlah KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten yang Divalidasi | 2 KLHS | 98,398,940 | DAU | | 2 KLHS | 350,410,000.00 |
| 3 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | Persentase ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH | 50% | 636,085,760 | | | 59% | 1,157,508,000.00 |

RENJA DLH PROV. SUL-BAR TAHUN 2021

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 3.1 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan | 20 Usaha/Kegiatan | 636,085,760 | | | 20 Usaha/Kegiatan | 1,157,508,000 |
| 3.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Provinsi | Jumlah penanggungjawab usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH | 120 Orang | 136,087,100 | DAU | | 120 Orang | 353,710,000.00 |
| 3.1.2 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Provinsi | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengawasan Lingkungan Hidup | 30 Orang | 199,998,660 | DAU | | 30 Orang | 353,710,000.00 |
| 3.1.3 | Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 6 Kabupaten | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi oleh pemerintah Provinsi | 40 Usaha/Kegiatan | 300,000,000 | DAU | | 40 Usaha/Kegiatan | 450,088,000.00 |
| 4 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan | 100% | 624,753,180 | | | 100% | 1,121,640,000 |
| 4.1 | Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | | Jumlah Pengaduan yang tertangani | 10 Pengaduan | 624,753,180 | | | 10 Pengaduan | 1,121,640,000 |
| 4.1.1 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi | 6 Kabupaten | Jumlah pengaduan lingkungan yang diterima | 10 Pengaduan | 224,755,860 | DAU | | 10 Pengaduan | 459,040,000.00 |
| | | Provinsi, 6 Kabupaten | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | 120 Orang | 199,998,660 | DAU | | 120 Orang | 308,890,000.00 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 4.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | Provinsi | Jumlah Peserta Bimbingan teknis Tata Cara Penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan | 30 Orang | 199,998,660 | DAU | | 30 Orang | 353,710,000.00 |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | Persentase peningkatan pengelolaan potensi keanekaragaman hayati Sulawesi Barat | 100% | 742,299,240 | | | 100% | 550,000,000 |
| 5.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | | Jumlah pengelolaan kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola Provinsi | 5 | 742,299,240 | | | 5 | 550,000,000 |
| 5.1.1 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Provinsi | Jumlah Dokumen Profil Kehati | 1 dokumen Profil Kehati | 249,997,600 | DAU | | 1 dokumen Profil Kehati | 150,000,000.00 |
| 5.1.3 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | 6 Kabupaten | Jumlah Demplot kehati | 7 Demplot kehati | 492,301,640 | DAU | | 7 Demplot kehati | 400,000,000.00 |
| 6 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | Persentase Pij (Indeks Pencemar) yang memenuhi baku mutu | 67% | 11,841,707,440 | | | 67% | 4,600,000,000 |
| | | | Persentase kabupaten IKU diatas nilai 90 | 67% | 585,062,266 | | | 67% | 585,062,266 |
| | | | Cakupan peningkatan Tutupan Lahan | 30 | 1,825,283,300 | | | 30 | 1,600,000,000 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 6.1 | Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | Jumlah titik pengujian yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien | 16 | 585,062,266 | | | 16 | 585,062,266 |
| | | | Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu | 78% | 9,791,707,440 | | | 78% | 2,750,000,000 |
| 6.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Provinsi, 6 Kabupaten | Jumlah parameter dalam pemantauan kualitas lingkungan hidup | 14 | 7,200,000,000 | DAU | | 14 | 400,000,000.00 |
| | | Polewali, Mamuju | Jumlah sungai yang ditingkatkan kualitasnya | 2 | 541,707,440 | DAU | | 2 | 500,000,000.00 |
| 6.1.2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 6 Kabupaten | Jumlah kampung iklim | 7 Kampung Iklim | 435,062,266 | DAU | | 7 Kampung Iklim | 435,062,266 |
| | | Provinsi | Jumlah Laporan Inventarisasi GRK | Profil Emisi Persektor | 150,000,000 | DAU | | Profil Emisi Persektor | 150,000,000 |
| | | | Persentase Peningkatan Bengkel/servis yang mendukung pengurangan bahan perusak ozon | 50% | | DAU | | 50% | |
| 6.2 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | Persentase parameter yang terakreditasi | 12 | 2,050,000,000 | | | 12 | 1,850,000,000 |
| 6.2.1 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Provinsi, 6 Kabupaten | Jumlah Laporan Hasil Uji yang tervalidasi | 150 Dokumen | 600,000,000.00 | DAU | | 150 Dokumen | 550,000,000.00 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | pada Masyarakat | | | | | | | | |
| | | Provinsi | Jumlah sarana prasarana pengujian laboratorium | 1 | 200,000,000.00 | DAU | | 1 | |
| | | Provinsi | Jumlah ruang lingkup pengendalian mutu yang tervalidasi | 30 | 1,000,000,000.00 | DAU | | 30 | 1,000,000,000.00 |
| | | Provinsi | Jumlah pengelola laboratorium yang ditingkatkan kapasitasnya | 14 | 250,000,000.00 | DAU | | 14 | 300,000,000.00 |
| 6.3 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | Luas kawasan Kerusakan Lahan yang dipulihkan kondisinya | 30 | 1,825,283,300 | | | 30 | 1,600,000,000 |
| 6.3.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Pasangkayu, Polewali, Majene, Mamuju, Mamasa | Luas wilayah yang direhabilitasi | 20 | 1,343,191,500 | DAU | | 20 | 1,000,000,000.00 |
| | | Provinsi | Jumlah Dokumen Pemetaan | 2 | 482,091,800 | DAU | | 2 | 600,000,000.00 |
| 7 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | Persentase limbah B3 yang terkelola | 1.13% | 523,238,600 | | | 1.13% | 500,000,000 |
| 7.1 | Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | Jumlah titik pengumpulan limbah B3 | 8 | 523,238,600 | | | 8 | 500,000,000 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 7.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Provinsi dan 6 Kabupaten | Jumlah Limbah B3 yang terkelola | 23,3513 ton | 523,238,600 | DAU | | 23,3513 ton | 500,000,000.00 |
| 8 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | Persentase Penanganan Sampah | 55,5% | 1,559,726,620 | | | 55,5% | 1,450,000,000 |
| 8.1 | Penanganan Sampah di TPA/TPST regional | | Volume timbulan sampah yang tertangani/terkelola | 74.900,77 Ton | 1,559,726,620 | | | 74.900,77 Ton | 1,450,000,000 |
| | | | Jumlah sarana prasarana penanganan sampah TPA | 1 | | | | 1 | |
| 8.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional | Mamuju | Jumlah dokumen kebijakan Penanganan sampah | 1 | 349,889,520 | DAU | | 1 | 350,000,000.00 |
| 8.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional | 6 Kabupaten | Jumlah titik penanganan sampah TPA | 4 | 409,889,520 | DAU | | 4 | 400,000,000.00 |
| | | Mamuju, Polewali, Majene, Mamasa, Mamuju Tengah | Jumlah peserta bimbingan teknis penanganan sampah | 200 Ok | 799,947,580 | DAU | | 200 Ok | 700,000,000.00 |
| 9 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | | persentase MHA yang diakui | 33% | 321,770,484 | | | 33% | 321,770,484 |

RENJA DLH PROV. SUL-BAR TAHUN 2021

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 9.1 | Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | Jumlah MHA yang diakui | 1 | 321,770,484 | | | 1 | 321,770,484 |
| 9.1.1 | Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Provinsi dan 6 Kabupaten | Jumlah MHA teridentifikasi terkait PPLH | 3 | 321,770,484 | DAU | | 3 | 321,770,484 |
| 10 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | Persentase peningkatan lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan | 100 | 968,551,880 | | | 100 | 968,551,880 |
| 10.1 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | | Jumlah lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan pilot project | 3 | 968,551,880 | | | 3 | 968,551,880 |
| 10.1.1 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan | | Jumlah lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan yang memperoleh peningkatan kapasitas PPLH | 200 Orang | 250,000,000.00 | DAU | | 200 Orang | 250,000,000.00 |
| 10.1.2 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Provinsi, Pasangkayu, Mamasa, Mamuju | Jumlah kader sakakalpataru yang terlatih | 4000 | 188,044,080 | DAU | | 4000 | 188,044,080 |
| | | 6 Kabupaten | Jumlah sekolah peduli lingkungan | 10 Sekolah | 530,507,800 | DAU | | 10 Sekolah | 530,507,800 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Indikator | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 11 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | Cakupan penerima penghargaan lingkungan | 10 | 508,716,260 | | | 10 | 508,716,260 |
| 11.1 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | | Jumlah Kabupaten penerima penghargaan ADIPURA | 1 | 150,000,000 | | | 1 | 150,000,000 |
| | | | Jumlah penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi | 1 | 358,716,260 | | | 1 | 358,716,260 |
| | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Provinsi (Pasangkayu) | Jumlah titik pemantauan ADIPURA | 4 | 150,000,000.00 | DAU | | 4 | 150,000,000.00 |
| | | Provinsi, Pasangkayu, Mamuju Tengah | Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti PROPER | 8 | 104,873,260 | DAU | | 8 | 104,873,260 |
| | | Polewali | Jumlah penghargaan PPLH yang dibagikan pada peringatan HLH | 4 | 253,843,000 | DAU | | 4 | 253,843,000 |
| | | | | | 25,530,117,000 | | | | 24,231,404,575 |

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berpedoman pada Draft RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 dan isu-isu strategis dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 serta RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021. Adapun arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2021 adalah “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat ini adalah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan menjadi acuan dan arahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.